

BAB I

PENDAHULUAN

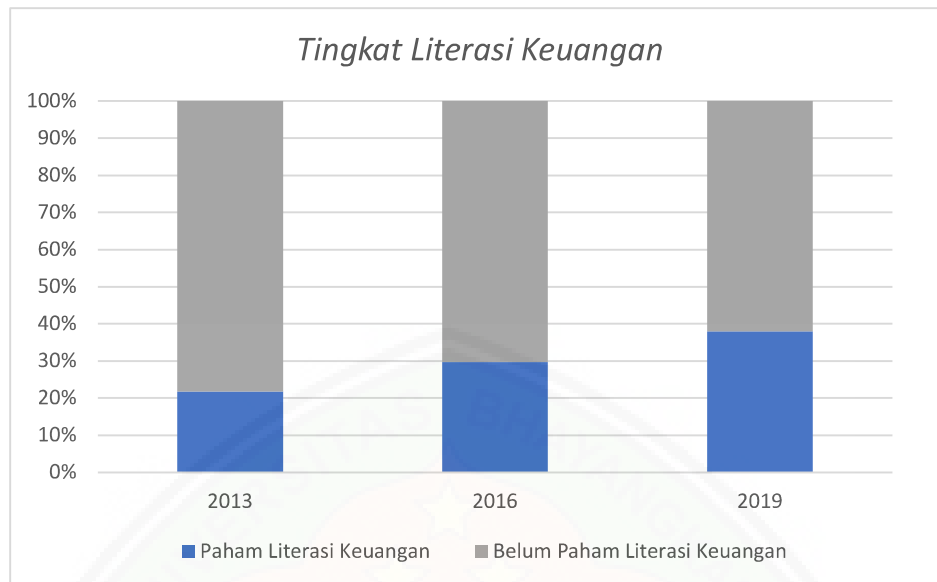
1.1 Latar Belakang Masalah

Menghadapi tahun ekonomi digital yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2020, dimana pemerintah memprioritaskan program untuk menciptakan 1000 teknopreneur atau wirausaha yang berbasis teknologi (kominfo.go.id, 2016). Hal ini akan diikuti oleh *platform* keuangan yang akan berkembang dengan menggunakan sistem yang berbasis teknologi untuk menyalurkan berbagai produk dan jasa keuangan, salah satunya dikenal dengan *fintech*. Perkembangan produk dan jasa keuangan tersebut bisa saja merubah pola hidup masyarakat, dengan dimudahkan dalam bertransaksi dengan sistem modern seperti yang dirasakan dewasa ini.

Kemudahan yang muncul dengan berkembangnya sistem teknologi kemungkinan akan menimbulkan hal baru yang membuat literasi keuangan masyarakat berubah untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Adapun literasi keuangan merupakan kemampuan pengetahuan akan pemahaman keuangan dalam mengelolanya untuk mengambil keputusan yang efektif serta efisien, yang membantu masyarakat agar terhindar dari risiko-risiko keuangan akibat pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan yang salah di masa mendatang (Yushita, 2017). Fundamental keuangan masyarakat Indonesia pada umumnya terlihat dari sikap dan perilaku literasi keuangannya. Pembelajaran tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan Edukasi Keuangan yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap lembaga jasa keuangan, karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan, serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana rasio aset yang dimiliki dengan kewajiban, kebutuhan, serta beban yang harus di tanggung, juga bagaimana menyisihkan pendapatan untuk investasi di masa depan.

Literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk mencapai tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, dapat dilihat dari program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada tanggal 19 November tahun 2013 silam, sebagai pedoman bagi OJK maupun lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan edukasi keuangan. Namun, seiring dengan perkembangan konsep literasi keuangan di berbagai negara, maka konsep literasi keuangan di Indonesia pun mengalami berbagai perubahan. Hal tersebut diperlukan agar tercapaian target literasi keuangan Indonesia untuk meraih hasil yang lebih optimal dan menyeluruh. Pemerintah terus melakukan peningkatan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan peraturan tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Adapun inklusif keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan dapat dilihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK setiap tiga tahun yang dimulai dari tahun 2013, 2016 dan 2019 lalu. pada SNLIK yang dilakukan tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Gambar 1.1. Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia

Dengan demikian dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.

Dengan meningkatnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tentu merupakan hal yang positif. Pencapaian tersebut perlu diapresiasi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Namun, dengan hasil indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut masih jauh dari harapan pemerintah, karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat pendapatan yang merata didukung pengetahuan akan literasi keuangan. Ketimpangan pendapatan masyarakat dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional (Ihsan et al., 2018), masalah tersebut

akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan tidak hanya dilihat dari nilai pendapatan tiap-tiap individu, namun juga dapat dilihat dari literasi keuangannya, kemudian bagaimana memaksimalkan penghasilan yang dikembangkan melalui investasi (Anggiat Mugabe Damanik, Zulgani, 2018).

Pengelolaan keuangan yang telah dihasilkan dari bekerja dan berwirausaha dapat dikembangkan melalui investasi pada produk dan jasa keuangan yang terdaftar oleh OJK. Tentunya kegiatan berinvestasi memiliki risiko-risiko keuangan, dan untuk terhindar dari risiko-risiko tersebut, maka perlu pengetahuan dan strategi dalam pengelolaannya. Maka penting untuk menentukan skala prioritas dalam mengelola besaran kebutuhan akan kewajiban dan konsumsi, juga menentukan target dari investasi yang ingin dicapai. Dalam menentukan prioritas perencanaan keuangan (Tarigan, 2017) dapat ditentukan sebagai berikut : Prioritas Perencanaan Keuangan Pribadi atau Rumah Tangga : (a) Pelunasan hutang-hutang, Hutang kartu kredit harus dilunasi secepat mungkin, sedangkan kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit elektronik sebaiknya tidak boleh lebih 30% dari pendapatan. (b) Penyediaan dana darurat, Dana ini harus ada karena sangat berguna saat kita tidak punya penghasilan dan bentuknya dapat disimpan dalam bentuk emas. (c) Investasi, Investasi seharusnya menjadi gaya hidup masa kini, cobalah sisihkan 10% dari pendapatan anda perbulan dan diinvestasikan. Maka ada kemungkinan kita mendapat penghasilan tambahan. (d) *Passive Income*, Tujuan tersebut harus memiliki jangka waktu yang jelas. Namun, perhitungan dalam pengelolaan uang diatas tidaklah mutlak untuk semua kalangan dengan jenis profesi atau mata pencaharian yang berbeda-beda, hanya sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan individu.

Masalah keuangan tentu menimpa siapa pun dimana saja, tidak memandang status dan jabatan. Dari masyarakat biasa, karyawan, buruh, petani, PNS, Polisi, maupun Prajurit TNI dan banyak lainnya. Prajurit Tentara Nasional (TNI) Indonesia pada dasarnya sama seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari segi golongan dalam jabatan, merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia Perubahan Kedua Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang*, 2019) telah diatur besaran pendapatan yaitu gaji dan tunjangan kinerja berdasarkan golongan dan pangkat prajurit. Maka apabila dilihat dari peraturan tersebut, sejatinya kesejahteraan ASN/PNS dan Prajurit TNI adalah setara dengan apa yang diberikan oleh negara.

Dinamika kehidupan Prajurit TNI di dalam rumah tangga sama seperti masyarakat pada umumnya. Pengelolaan keuangannya dalam kehidupan sehari-hari bersumber dari pendapatan yang telah diraih. Namun yang membedakan dengan masyarakat sipil, adalah prinsip dan tugas di dalam kemiliteran, dimana para prajurit harus siapsedia kapan pun dan dimana saja ketika tugas negara memanggil.

Perbedaan tersebut yang bisa saja merubah alur pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga tiap-tiap keluarga prajurit. Ketidakpastian dalam segi waktu dan tempat dalam memenuhi panggilan tugas negara membuat perencanaan keuangannya berbeda dari segi strategi keuangan dengan pegawai dan karyawan swasta lainnya yang mempunyai kepastian dalam hal waktu dan tempat dalam bekerja.

Disamping situasi yang dihadapi oleh prajurit TNI dari tugasnya, tentu mereka mempunyai keinginan untuk hidup mapan selain yang telah negara berikan untuk kesejahteraan mereka. Takaran hidup mapan mungkin berbeda-beda pada setiap orang dan setiap daerah, namun dorongan budaya konsumtif terutama dengan gaya hidup yang *hedonisme* membuat menjadikan pendapatan yang diterima serasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya, sebagian dari pegawai atau pekerja swasta mempunyai penghasilan tambahan selain dari penghasilannya bekerja, ada yang berwirausaha, memanfaatkan *skill* dengan membuka jasa, atau memperoleh selisih dari produk atau jasa orang lain yang mereka tawarkan. Namun, untuk prajurit TNI. Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terbentur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 39 (Kemesesneg, 2004), bahwa Prajurit TNI dilarang untuk berbisnis. Maka, perolehan pendapatan Prajurit TNI mengandalkan gaji mereka ditambah tunjangan-tunjangan sesuai dengan kriteria untuk kehidupan dan masa

depan. Sedangkan kebutuhan hidup belakangan ini semakin tinggi dengan harga-harga kebutuhan pokok yang bertahap mengalami kenaikan, hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Harga Konsumen dalam 5 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Indeks Harga Konsumen 2015-2019

Bulan	2015		2016		2017		2018		2019	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	118.71	-0.24	123.62	0.51	127.94	0.97	132.10	0.62	135.83	0.32
Februari	118.28	-0.36	123.51	-0.09	128.24	0.23	132.32	0.17	135.72	-0.08
Maret	118.48	0.17	123.75	0.19	128.22	-0.02	132.58	0.20	135.87	0.11
April	118.91	0.36	123.19	-0.45	128.33	0.09	132.71	0.10	136.47	0.44
Mei	119.5	0.5	123.48	0.24	128.83	0.39	132.99	0.21	137.40	0.68
Juni	120.14	0.54	124.29	0.66	129.72	0.69	133.77	0.59	138.16	0.55
Juli	121.26	0.93	125.15	0.69	130.00	0.22	134.14	0.28	138.59	0.31
Agustus	121.73	0.39	125.13	-0.02	129.91	-0.07	134.07	-0.05	138.75	0.12
September	121.67	-0.05	125.41	0.22	130.08	0.13	133.83	-0.18	138.37	-0.27
Oktober	121.57	-0.08	125.59	0.14	130.09	0.01	134.2	0.28	138.4	0.02
November	121.82	0.21	126.18	0.47	130.35	0.2	134.56	0.27	138.6	0.14
Desember	122.99	0.96	126.71	0.42	131.28	0.71	135.39	0.62	139.07	0.34
Tingkat Inflasi		3.35		3.02		3.61		3.13		2.72

Sumber (BPS 2020)

Berdasarkan data tersebut maka akan selalu terjadi kenaikan harga kebutuhan di setiap tahunnya. Bagi yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, biaya pendidikan untuk anak-anak, dan biaya telekomunikasi yang menjadi bagian pokok di era digital sekarang, lalu biaya-biaya kewajiban lainnya.

Kemudian, dalam mencapai sebuah kesejahteraan setiap individu juga harus memikirkan dan menghitung berapa yang harus dialokasikan untuk tabungan yang berguna untuk masa yang akan datang. Lalu memperhitungkan kembali bagaimana sikap dalam berhutang apakah untuk konsumtif semata atau ada nilai investasi di dalamnya. Berbagai produk tabungan dan juga investasi yang di tawarkan oleh pemerintah, bank, dan perusahaan dengan *platform* keuangan telah banyak beredar, akan tetapi perlu pemahaman akan produk-produk tersebut oleh prajurit TNI.

Pengetahuan akan produk investasi yang aman dapat terhindar dari produk-produk investasi bodong yang belakangan ramai bermunculan. Di media massa belum lama

ini diberitakan ada beberapa oknum TNI yang menjadi korban investasi bodong. Dikutip dari beberapa pemberitaan media salah satunya dari (detikNews, 2017) Senin, 20 Feb 2017, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut pada waktu itu Laksamana Pertama Gig Joniaz Mozes Sipasulta membenarkan bahwa sejumlah anggota TNI AL menjadi korban penipuan investasi bodong salah satu koperasi. “Ada memang yang terlibat, tapi kita masih dalam proses. Masih kita verifikasi, siapa saja dan bagaimana keterlibatannya, apakah sebagai leader atau anggota. Tapi saya akui memang ada”, tutur Kadispenal. Dinamika tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tingkat literasi keuangan prajurit terhadap investasi keuangan.

Berdasarkan uraian diatas tentang dinamika keuangan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi serta Investasi Keuangan terhadap Literasi Keuangan Individu (Studi Kasus Prajurit TNI yang Berdinas di Dinas Penerangan Angkatan Laut, Mabes TNI AL, Jakarta”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pada uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah jumlah Pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut?
2. Apakah pola Konsumsi berpengaruh secara parsial terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut?
3. Apakah perilaku Investasi Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut?
4. Apakah jumlah Pendapatan dan pola Konsumsi serta perilaku Investasi Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji bahwa pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut.
2. Untuk menguji bahwa Konsumsi berpengaruh secara parsial terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut
3. Untuk menguji bahwa Investasi Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut.
4. Untuk menguji bahwa Pendapatan dan pola Konsumsi serta perilaku Investasi Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Literasi Keuangan Individu di Dinas Penerangan Angkatan Laut?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Objek Penelitian

Bagi objek penelitian yaitu prajurit TNI AL Dispenal, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan pengetahuan dalam literasi keuangan terutama perencanaan keuangan melalui jurnal online yang diterbitkan setelah penelitian ini selesai.

2. Bagi Akademisi

dapat memberikan ilmu dan informasi yang berguna bagi mahasiswa dan dapat digunakan sebagai acuan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan edukasi yang dapat memberikan ilmu dan informasi yang berguna bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengelola keuangan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup pembahasan masalah yaitu tentang Pengaruh Pendapatan, Konsumsi, dan Investasi Terhadap Literasi Keuangan para Prajurit TNI AL. Namun karena keterbatasan waktu, tempat, dan biaya, penulis mengambil penelitian kepada prajurit TNI yang berdinasi di Dinas Penerangan

Angkatan Laut (Dispenal) Mabasal. Hal tersebut untuk mempermudah mendapatkan responden serta mempercepat proses penyelesaian penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bab ini, dijelaskan isi dari masing-masing bab yang disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka:

Dalam bab ini menjelaskan mengenai literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III Metode Penelitian:

Dalam bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV Gambaran Subyek Penelitian Dan Analisis Data:

Dalam bab ini menjelaskan mengenai profil organisasi/perusahaan (bila ada), hasil analisis data, pembahasan (diskusi) hasil penelitian. gambaran subyek penelitian.

BAB V Penutup:

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak terkait maupun peneliti berikutnya.